

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Konservasi Kawasan Tlogo Muncar Taman Nasional Gunung Merapi

Upaya Taman Nasional Gunung Merapi dalam pengelolaankonservasi kawasan wisata Tlogo Muncar adalah dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar kawasan wisata Tlogo Muncar dengan cara melakukan berbagai kegiatan atau progam seperti:¹

Tabel 4.1 Data Progam Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Tlogo Muncar

No	Nama Program	Subyek	Upaya Pengelolaan Konservasi
1	Masyarakat Peduli Api (MPA)	Masyarakat sekitar kawasan Tlogo Muncar	Penyuluhan dan diberikan perlengkapan alat-alat pemadam kebakaran.
2	Model Desa Konservasi (MDK)	Masyarakat sekitar desa konservasi	Produksi teh plawangan dan program program lainnya yang mampu mencukupi perekonomian masyarakat sekitar konservasi
3	Budidaya Anggrek	Masyarakat sekitar kawasan wisata Tlogo Muncar dan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat	Melestarikan tanaman anggrek yang berada di Tlogo Muncar untuk dibudidayakan yang kemudian hasilnya dapat di pasarkan kepada pengunjung kawasan wisata Tlogo Muncar dan juga diharapkan dapat menarik pengunjung sehingga kawasan wisata Tlogo Muncar lebih berkembang sebagai kawasan wisata alam.

¹ Hasil wawancara dengan Teguh Wardaya, Kepala Resort Pakem Turi SPTN Wilayah 1 pada tanggal 30 desember 2015

1. MPA (Masyarakat Peduli Api)
2. MDK (Model Desa Konservasi)
3. Budidaya Anggrek

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat diberikan ilmu-ilmu dan penyuluhan tentang pentingnya konservasi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat menjaga dan melestarikan konservasi karena sangat diyakini bahwa hutan lestari maka masyarakat akan sejahtera.

Masyarakat Peduli Api (MPA) dibentuk menjadi beberapa kelompok di sekitar kawasan Tlogo Muncar yang termasuk juga dalam 30 desa penyangga. Masyarakat Peduli Api diberikan bekal suatu penyuluhan dan arahan apabila terjadi kebakaran, tindakan apakah yang harus dilakukan. Selain penyuluhan, masyarakat juga diberikan perlengkapan berupa alat-alat yang berfungsi sebagai alat pemadam apabila terjadi kebakaran. Alat-alat tersebut diberikan kepada masing-masing kelompok Masyarakat Peduli Api.

Model usaha (MDK) adalah suatu desa yang berada disekitar hutan kawasan konservasi TNGM, dimana hutan tersebut keberadaanya dilindungi oleh pemerintah. Masyarakat tidak boleh mengambil rumput atau mengambil kayu dari kawasan konservasi tersebut. Karena hutan tersebut tidak boleh diganggu keberadaannya oleh masyarakat maka masyarakat sekitar konservasi tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi perekonomian keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi

masyarakat sekitar konservasi maka pihak TNGM membentuk Model Desa Konservasi dimana mereka diberikan suatu pembinaan dan kegiatan/progam yang bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat. Dengan adanya teh pengelolaan produksinya ditangani langsung oleh masyarakat. Dengan adanya teh plawangan yang dihasilkan oleh Desa Konservasi maka diharapkan juga dapat menarik pengunjung untuk menikmati kawasan konservasi yang tetap lestari sekaligus dapat memberikan penghasilan masyarakat Desa Konservasi dengan mereka membeli hasil karya warga Desa Konservasi.

Untuk kegiatan budidaya anggrek, masyarakat diberikan suatu ilmu tentang jenis-jenis anggrek yang ada dikawasan wisata Tlogo Muncar dan cara perawatanya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerjasama dengan TNGM. LSM tersebut adalah KANOPI. Dengan adanya kegiatan budidaya anggrek tersebut masyarakat dapat mengembangkan tanaman anggrek yang ada di Tlogo Muncar untuk di budidayakan yang kemudian hasilnya dapat dipasarkan kepada pengunjung kawasam wisata Tlogo Muncar. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, budidaya anggrek juga diharapkan dapat menarik pengunjung sehingga kawasrn wisata Tlogo Muncar lebh berkembang sebagai kawsan wisata alam.

Dalam kawaan TNGM, diperlukan penetapan zonasi yang dilindungi secara hukum. Penetapan zonasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006. Untuk keperluan tersebut

dilakukan penilaian terhadap potensi kawasan yang didasarkan pada beberapa aspek berikut:

a. Aspek Ekologis keanekaragaman Hayati.

Kawasan TNGM memiliki potensi keanekaragaman hayati yang khas dan kaya akan jenis. Dengan keberadaan kawasan tersebut di Pulau Jawa yang padat populasi, menjadikan potensi keanekaragaman hayati ini rawan terhadap kerusakan. Oleh karena itu dilindungi keberadaan dan kelestariannya. Dalam upaya mempertahankan keutuhan keanekaragaman hayati ini perlu ditempatkan sebagai bagian dalam ekosistem. Dengan demikian dari aspek ekologis yang menekankan adanya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati menjadi penting dalam penyusunan zonasi. Pertimbangan aspek ini sekaligus merupakan bagian integral dari konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Aspek kebijaksanaan dan peraturan perundangan

Mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 disebutkan bahwa pengelolaan taman nasional harus dilaksanakan dengan sistem zonasi. Dengan ketentuan tersebut maka adalah suatu kewajiban konstitusional dalam implementasi kebijakan pengelolaan pada masing-masing zona taman nasional untuk memerlukan perlindungan dan memberikan sanksi. Dengan adanya zonasi juga memberikan implikasi pada implementasi pengelolaan terhadap tingkatan perlakuan perlindungan dan tingkatan sanksi terhadap pelanggaran.

c. Aspek Azas Manfaat

Pembagian zonasi di TNGM harus memperhatikan tingkat ketergantungan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan terhadap potensi sumberdaya alam taman nasional. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap potensi sumberdaya alam dalam kawasan rencana TNGM menyangkut kebutuhan kayu bakar untuk rumah tangga, rumput untuk pakan ternak sapi perah dan bahan galian C berupa pasir. Selain pemanfaatan oleh masyarakat sekitar kawasan, TNGM juga memiliki potensi sumber daya alam sebagai obyek turis, baik turis nusantara maupun mancanegara. Aspek turis yang dipertimbangkan dalam penetapan zonasi adalah karakteristik dan distribusi turis pada obyek-obyek di dalam kawasan rencana TNGM. Dengan demikian penyusunan zona dengan pertimbangan untuk mengakomodasi kebutuhan turis seperti pengakomodasian kegiatan rekreasi alam, penelitian, pendidikan, berkemah, karuya wisata dan lain-lain tanpa menyebabkan kerusakan sumberdaya alam hayati yang ada. Adanya rencana TNGM dengan kebijakan pengelolaan dan mengakomodasi berbagai kepentingan diharapkan mampu mendukung pembangunan wilayah disekitarnya dan sebaliknya.

Berdasarkan undang-undang No 5 tahun 1990, "Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola

dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi”.²

Adapun sasaran pengelolaan Taman Nasional adalah tercapainya 3 (tiga) fungsi yaitu:³

- a. Perlindungan sisten penyangga kehidupan.
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alama hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, disebutkan juga bahwa taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari: zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainya. Zona inti diperuntukan adanya kegiatan-kegiatan penelitian dan pendidikan, tidak diperkenankan adanya kegitan wisata maupun pembangunan sarana dan prasarana.Zona pemanfaatan diupayakan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat disekitarnya, yaitu dengan mengelola wisata dengan segala aspeknya, tanpa mengurangi kepentingan konservasi sumberdaya alam itu sendiri.Zona ini lebih banyak diperuntukan bagi kegiatan pariwisata alam dengan membangun sarana dan prasarana wisata termasuk bangunan pengelolaan Taman Nasional.

Sedangkan zona lainya bisa berupa zona rimba yang fungsinya untuk melindungi zona inti dan bagi kegiatan kunjungan terbatas dengan sarana dan prasarana terbatas pula. Selain dari zona rimba, jika dibutuhkan dapat

² Renstra Balai Tman Nasional Gunung Merapi Tahun 2004-2014

³ Ibid,

ditetapkan zona lainya, yaitu: zona pemanfaatan lainya, zona rehabilitasi dll. Zona-zona ini ditetapkan atas dasar adanya potensi lahan serta pada sisi lain adanya tekanan penduduk yang tinggi. Pada rencana Pengelolaan TNGM ini, zonasi dalam TNGM dibagi dalam zona khusus , zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan wisata alam, zona pemafaatan lainnya dan zona rehabilitasi. Zona khusus merupakan daerah aliran lahar gunungmerapi.Zona wisata alam diperuntukan bagi kegiatan pariwisata alam terbatas, sedangkan Zona pemanfaatan lainnya diperuntukan bagi pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat seperti pengambilan pasir, rumput dibawah tegakan dan budaya labuhan.Zona rehabilitasi merupakan daerah-daerah yang rusak akibat kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti, penambangan pasir dan perambahan kawasan.Pada daerah-daerah tersebut perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan penanaman tumbuhan asli sehingga dapat mengembalikan fungsinya, tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.⁴

Salah satu zona dalam kawasan TNGM diusulkan untuk ditetapkan sebagai zona pemanfaatan wisata alam.Namun demikian dalam konteks kebijakan pengelolaan TNGM maka perencanaan pengembangan obyek wisata alam ditempatkan sebagai bagian pengelolaan TNGM.Beberapa bangunan fasilitas infrastruktur wisata alam yang telah ada dan keberadaanya berada di kawasan TNGM merupakan modal yang perlu dilanjutkan.Untuk keperluan tersebut perlu diawali dengan studi yang

⁴ Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2004, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024*, Yogyakarta, hlm 7

komprehensif tentang pengembangan wisata alam di kawasan TNGM yang ditinjau baik secara sosial, budaya, ekonomi, fisik, lingkungan maupun perlunya penekanan aspek pendidikan masyarakat. Memasukan berbagai bentuk pemasaran dalam perencanaan. Dengan demikian studi pengembangan mempunyai dua sasaran, yaitu pengembangan wisata alam yang sudah ada dan pengembangan wisata alam baru. Oleh karena itu kerjasama dengan berbagai instansi terkait sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil perencanaan yang komprehensif yang secara ekonomi layak, secara sosial, budaya dan pendidikan diterima dan secara berkelanjutan lingkungan dapat diandalkan.⁵

Peningkatan kapasitas kelembagaan, baik formal maupun non formal (LSM) yang terkait dengan konservasi dan lingkungan hidup adalah :⁶

- a. Menegosiasikan kawasan TNGM daerah-daerah kritis yang harus berfungsi sebagai ekologis konservasi tapi mempunyai nilai ekonomi (misal kawasan penambangan galian C).
- b. Menggunakan serta melatih petugas dari lembaga baik formal maupun non formal (LSM) yang terkait dengan konservasi dan lingkungan hidup untuk bertugas di bidang pendidikan, penyuluhan dan penegakan hukum.

Selain bekerjasama dengan LSM mengenai budidaya anggrek, saat ini Taman Nasional Gunung Mearapi juga melakukan kerja sama dengan pihak LSM infront dimana LSM tersebut telah diseleksi oleh pihak TNGM

⁵ Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2004, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024*, Yogyakarta, hlm 73

⁶ Ibid, hlm 22

sehingga dapat kerjasama dengan TNGM dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan wisata alam Tlogo muncar dan sekitarnya.

B. Aspek Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Konversi Kawasan Wisata Alam Tlogo Muncar

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata alam adalah peran serta masyarakat secara sukarela dalam kegiatan teknis maupun non teknis yang diwujudkan dalam bentuk jasa dan dana. Kegiatan teknis terdiri dari pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem, pengembangan konservasi spesies dan genetic, penyidikan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan pengembalian pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Untuk kegiatan non teknis terdiri dari gotong royong, serta penerapan norma dan nilai luhur yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kawasan wisata alam.

Kawasan wisata alam Tlogo Muncar Taman Nasional Gunung Merapi dikelola dengan sistem zonasi. Kebijakan penetapan zonasi memiliki pedoman yaitu pedoman zonasi dalam taman nasional dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola kawasan taman nasional dan bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan taman nasional sesuai dengan fungsinya. Dalam mewujudkan sistem pengelolaan taman nasional, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional juga menguraikan tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman nasional dengan sistem zonasi. Penetapan

zonasi taman nasional juga bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam sistem zonasi taman nasional antara lain:

1. Memberi saran, informasi dan pertimbangan.
2. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan zonasi.
3. Melakukan pengawasan kegiatan zonasi.
4. Ikut menjaga dan memelihara zonasi.

Partisipasi masyarakat yang ada dalam kawasan TNGM pada umumnya adalah masyarakat yang peduli terhadap pengembangan lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan konservasi kawasan wisata alam Tlogo Muncar adalah dalam menjaga keamanan kawasan, menjaga kebersihan dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Kegiatan tersebut mulai muncul dengan adanya penyuluhan tersebut juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sehingga masyarakat mulai sadar dan memiliki inisiatif sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan konservasi kawasan wisata alam Tlogo Muncar.⁷ Berdasarkan populasi penelitian adalah masyarakat sekitar Wisata Alam Tlogo Muncar yang berpendidikan minimal SD sehingga responden mampu membedakan pendapat.

Partisipasi masyarakat diwisata alam Tlogo Muncar dapat di diferensiasikan dalam beberapa aspek, yaitu:

⁷ Hasil dialog dengan Bapak Djembadi Ketua Rt 01 Desa Hargobinangun pada tanggal 30 Desember 2015

1. Berdasarkan umur

Umur seseorang sangat berpengaruh produktivitasnya kerja serta kematangan alam beripikir dan pengalaman hidup. Pada usia muda peran masyarakat biasanya lebih produktif dalam berfikir maupun bekerja bila dibandingkan dengan masyarakat yang berumur lebih tua. Namun pada kenyataanya justru masyarakat dengan umur yang lebih tua yang mempunyai pengalaman lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berusia muda sehingga lebih mempunyai kematangan berpikir. Dari hasil penelitian yang saya ambil masyarakat yang turut berpartisipasi/berperan aktif dalam pengembangan wisata alam Tlogo Muncar adalah masyarakat dengan umur diatas 20 tahun dan dibawah usia 50 tahun. Seseorang yang berada dalam usia produktif peran atau partisipasinya akan semaikin besar dan semakin berpengaruh terhadap penegmabangan pariwisata alam kawasan TNGM.

2. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel4.2 Tingkat Pendidikan Responden Desa Target

Tingkat Pendidikan	Total	Pekerjaan					
		Petani 26.4%	Wiraswasta 19.6%	Pelajar/ mahasiswa 9.6%	Peternak 9.0%	Ibu rumah tangga 8.3%	Lain- lain 27.1%
Tamat SMA	39.4%	28.4%	64.5%	27.0%	22.9%	37.5%	40.0%
Tamat SMP	22.8%	29.4%	14.5%	24.3%	14.3%	34.4%	21.0%
Tamat SD	16.5%	21.6%	6.6%	8.1%	51.4%	21.9%	12.4%
D3/S1	5.2%	0.0%	1.3%	16.2%	0.0%	6.3%	10.5%
Lain-lain	16.0%	20.6%	13.2%	24.3%	11.4%	0.0%	16.2%
Total	100.0 %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Ket: Pada desa kontrol, tingkat pendidikan terakhir masyarakat secara umum adalah tamat SD (47.6%). Bila dilihat rinci maka petani pada umumnya tamat SD (56.5%), begitu pula dengan ibu rumah tangga (42.9%), sedangkan wiraswasta pada umumnya tamat SMA (33.3%). Secara umum pendidikan guru adalah setingkat SMA (50%).

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam mengembangkan pola pikir masyarakat dalam memahami suatu masalah dan informasi yang ada. Tingkat pendidikan petani dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh oleh masyarakat yang dinyatakan dengan lamanya (tahun). Semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan pola pikir dan kemampuan dalam memahami suatu masalah tertentu akan semakin baik. Faktor pendidikan pada umumnya merupakan pendorong daripada adanya perubahan. Belajar merupakan pendorong daripada

adanya perubahan. Belajar merupakan proses berkembang yang berlangsung seumur hidup dan tidak terbatas pada pendidikan formal yang ditempuh seseorang. Pendidikan akan mempengaruhi taraf pengetahuan seseorang dimana taraf pengetahuan ini akan berpengaruh pada tingkat intelektual seseorang. Mayoritas pendidikan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kawasan TNGM adalah masyarakat yang berpendidikan sampai dengan tingkat SMA.

3. Berdasarkan penghasilan/gaji

Kelancaran pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian daerah yang bersangkutan. Dari hasil pengambilan data di lapangan dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar kawasan TNGM mempunyai sarana perekonomian yang sangat kurang. Dengan sarana yang serba terbatas seperti ini maka pertumbuhan ekonomipun akan berjalan dengan sangat lambat. Dari hasil penelitian, pendapatan masyarakat sekitar kawasan wisata alam Tlogo Muncar mayoritas masih dibawah kata cukup yaitu kurang dari satu juta rupiah tiap bulanya dengan jumlah anggota keluarga yang kebanyakan berjumlah 5 orang.

Dalam pengembang dan pelestarian kawasan TNGM,sertapenerapan norma dan nilai luhur yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian kawasan TNGM kesadaran masyarakat sudah tergolong tinggi. Mereka sangat menyadari bahwa mereka tinggal

dikawasan penyangga hutan. Dimata mereka hutan merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang yang harus dijaga kelestariannya. Apapun kondisi yang terjadi dengan hutan merekalah yang harus bertanggung jawab dan merekalah yang akan menanggung akibatnya. Jika hutan lestari merekalah yang akan merasakan manfaatnya seperti udara yang sejuk, air yang melimpah, tanah yang subur, ekosistemnya yang terjaga dan lain-lain. Adanya mitos bahwa dengan menjaga kelestarian hutan maka mereka akan aman dari letusan gunung merapi sedikit banyak menjadi salah satu faktor pendukung kawasan TNGM. Dalam rangka kegiatan pengelolaan maupun pelesatrian kawasan TNGM. Masyarakat cenderung melaksanakannya secara berkelompok, hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak adalah tanggung jawab mereka bersama dan harus dilakukan secara bersama-sama.⁸

Meski terjadi perubahan status hutan lindung menjadi taman nasional sejak tahun 2004 lalu, hal ini tidak merubah sikap masyarakat sekitar TNGM dalam melestarikan hutan. Kesadaran masyarakat pentingnya kelestarian hutan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang sedikitoun tidak berkurang untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan, meskipun pemerintah dan pihak terkait sudah bnyak yang turun tangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan kelestarian hutan, masyarakat sekitar tetap

⁸ Renstra Balai Tman Nasional Gunung Merapi Tahun 2010-2014

berusaha semaksimal dan sebisa mungkin untuk mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kegiatan TNGM.⁹ Hal ini terbukti ketika pasca erupsi Gunung Merapi, dimana letusan tersebut mengakibatkan gundulnya beberapa hektar kawasan TNGM karena banyak pohon yang mati terkena awan panas dan lahar. Pasca letusan tersebut dari pihak pemerintah berupaya untuk mereboisasi lahan yang gundul karena terkena letusan dengan melakukan penanaman sejuta pohon dengan dukungan masyarakat.

Kegiatan pelestarian pengelolaan kawasan TNGM bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian hutan kawasan TNGM sehingga kebutuhan untuk keberadaan (*existence*), kebutuhan untuk berhubungan (*relatedness*), dan kebutuhan untuk berkembang (*growth*) dapat terpenuhi. Kebutuhan yang paling dianggap penting oleh masyarakat adalah kebutuhan keberadaan (*existence*) dimana didalamnya terdapat kebutuhan terpenuhinya kebutuhan pokok.

Penelitian dilakukan terhadap 20 orang warga masyarakat sekitar kawasan wisata alam Tlogo Muncar. 20 orang tersebut merupakan warga masyarakat yang tinggalnya paling dekat dengan kawasan wisata alam Tlogo Muncar dan salah satunya adalah ketua RT setempat yaitu Bapak Djembadi. Berdasarkan data-data yang diperoleh maka dapat dipaparkan bahwa kawasan wisata alam cukup bermanfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar dengan

⁹ Ibid,

berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kawasan wisata alam TNGM. Masyarakat bisa membuka restoran, menjadi pemandu wisata, mengusahakan penginapan, berjualan dalam kawasan pariwisata alam, mengusahakan angkutan menuju kawasan pariwisata, mengusahakan membuat jasa MCK serta dapat membuka jasa parkir kendaraan lalu kemudian hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat bisa mengandalkan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan kawasan TNGM sekaligus dapat memperbaiki perekonomian mereka yang tergolong rendah dengan mengusahakan jasa, berjualan atau usaha lain-lain yang mendukung pengembangan pariwisata alam TNGM. Oleh karena itu dengan semakin tingginya motivasi masyarakat dalam partisipasi pengembangan kawasan wisata alam maka taraf hidup mereka akan lebih baik dan dengan penghasilan yang mereka peroleh maka kebutuhan pokok sehari-hari dapat terpenuhi. Dengan hutan yang lestari, kawasan wisata alam yang berkembang maka masyarakat akan memperoleh manfaat secara ekologis yang tak ternilai harganya disamping manfaat-manfaat yang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan secara optimal. Diantaranya adalah sebagai sumber mata air bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ekosistem dari kombinasi biosystem, geosystem dan sociosystem yang unik,

menarik dan dinamis, mempunyai fungsi labotarium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konversi alam, dan mendukung kepentingan budidaya.

Obyek wisata alam (*ecotourim*) dan socioculture yang menjadi obyek pariwisata yang dapat memberikan kontribusi pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada dasarnya perilaku konservasi masyarakat sekitar hutan sudah tampak diantara masyarakat, dan dapat dijadikan pendukung pilar-pilar konservasi. Perilaku tersebut diantaranya adalah kesepakatan daiantara jenis yang sama minimal 5 pohon. Adanya pendapat bila hutan dihijaukan oleh hubungan spiritual dan supranatural antara merapi, Kraton Yogya dan Laut Selatan yang didasari atas anggapan Merapi bukan ancaman tapi sebagi sumber kehidupan.Untuk itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan usaha maupun kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran warga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan kelestarian hutan kawasan TNGM demi keoentingan bersama.

C. Keterlibatan Masyarakat Dalam keamanan dan Ketertiban Kawasan Serta kebijakan TNGM

Pengamanan kawasan diperlukan untuk menjamin keutuhan kawasan TNGM. Memecahkan permasalahan gangguan kawasan dan sekaligus meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan TNGM bagi kehidupan masyarakat saat ini dan masa yang

akan datang. Upaya pengamanan dan perlindungan ditekankan pada kegiatan untuk monitoring dan mengamankan adanya gangguan terhadap keutuhan kawasan TNGM berikut aset yang ada didalamnya. Kegiatannya berupa patrol rutin dan operasi gabungan serta kordinasi pengamana anatar instansi terkait.

Patroli rutin dilaksanakan oleh jagawana wilayah kerja masing-masing resort. Patroli ini difokuskan pada tempat-tempat yang rawan gangguan seperti tempat pengembangan galian pasir tanpa ijin (PETI), perambahan dan tempat lain yang rawan akan perburuan liar, pencurian kayu dan hasil hutan lainnya. Patroli perlu lebih diintensifkan di wilayah bekas PETI atau potensial dijadikan PETI karena masyarakat pelaku PETI ini seolah-olah main “kucing-kucingan” dengan petugas TNGM maupun petugas penegak hukum lainnya. Hal ini sangat mungkin karena petugas-petugas yang bertanggung jawab pada pengawasan dan pengamanan TNGM jumlahnya sangat terbatas. Selain itu lokasi juga sulit untuk dicapai sehingga sulit juga bagi petugas untuk terus menerus mengawasi kawasan. Dianjurkan minimal dua kali dalam sebulan patroli rutin dilaksanakan oleh petugas TNGM terutama ketempat-tempat yang telah diketahui sebagai lokasi PETI.¹⁰

Operasi gabungan dan koordinasi pengamanan. Operasi gabungan sebaiknya dilaksanakan jika keadaan keamanan benar-benar membutuhkan dukungan dan unsur pengamanan lain seperti TNI, dan PEMDA setempat.

¹⁰Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2004, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024*, hlm 76

Dengan demikian pelaksanaannya sesuai dengan situasi dilapangan. Mempertimbangkan perlunya pengamanan pada kawasan TNGM yang cukup luas, perlu koordinasi yang baik tidak saja antar instansi terkait tetapi juga dengan tokoh masyarakat sekitar kawasan. Oleh karena itu koordinasi ini harus terus dilakukan dari waktu ke waktu minimal setiap akan ada setelah pelaksanaan operasi gabungan.¹¹

Pengamanan kawasan selain dengan patroli rutin dan operasi gabungan juga dengan dilakukannya kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan TNGM. Kawasan TNGM berbatasan dengan 9 Kecamatan di 4 Kabupaten, selain itu kawasan juga berbatasan dengan pemukiman 30 Desa daerah penyangga kawasan TNGM. Masyarakat sekitar kawasan mempunyai kegiatan siskamling/ronda untuk pengamanan kampung tempat tinggal mereka. Selain sebagai pengamanan kampung, ronda juga sekaligus untuk menjaga keamanan kawasan TNGM. Masyarakat sekitar kawasan TNGM sangat berperan penting dalam pengamanan kawasan karena dengan lahan yang sangat luas dan petugas yang terbatas tidak memungkinkan petugas memantau keseluruhan keadaan sekitar kawasan setiap harinya. Dengan keadaan yang demikian maka sering diadakan penyuluhan terhadap warga masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam pelestarian hutan. Selain itu juga ada masyarakat yang terbentuk dalam kelompok masyarakat peduli api, jadi apabila terjadi kebakaran maka kelompok tersebut yang akan bertanggung jawab melapor

¹¹*Ibid*, hlm 77

kepada petugas keamanan TNGM.

Pasca erupsi Merapi, juga banyak diadakan penyuluhan tentang tanggap bencana terhadap masyarakat sekitar kawasan TNGM. Apabila terjadi bencana maka akan dibunyikan suara sirine tanda bahaya. Dalam penyuluhan tersebut yang pertama kali harus diselamatkan apabila terjadi bencana adalah masyarakat lanjut usia, ibu-ibu dan anak-anak. Namun, dalam hal ini yang bertanggung jawab dan berperan aktif/penting adalah Tim SAR.

Selain keamanan kawasan TNGM, keterlibatan kawasan TNGM juga diperhatikan untuk menjaga kelestarian dalam hal pengelolaan kawasan TNGM. Dalam hal ini ketertiban lokasi parkir dan pembuangan sampah pada tempatnya dapat dijadikan salah satu contohnya. Untuk menjaga kebersihan kawasan maka pengunjung harus tertib mematuhi peraturan yang ada terutama membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sedangkan untuk lokasi parkir, kawasan wisata alam TNGM juga menyediakan lokasi parkir yang cukup luas yang dikelola dengan kerjasama masyarakat sekitar. Apabila musim libur tiba dan lokasi parkir tidak cukup maka tidak sedikit dari warga yang menyediakan jasa dengan menggunakan halaman rumahnya sebagai lahan parkir, kegiatan tersebut dapat bermanfaat untuk menambah penghasilan mereka.

Masyarakat di sekitar kawasan TNGM merupakan masyarakat yang masih tetap ingin tinggal dipemukimannya sekarang. Keinginan tetap tinggal ini bisa diartikan sebagai cermin keterikatan masyarakat dengan

tanah leluhur sangatlah kuat. Namun demikian, kesamaannya adalah rasa terpinggirkan terhadap akses sumber daya produktif secara ekonomi sangat rentan dan sebagian besar pendidikannya relatif rendah dengan ketrampilan diunggulkan terbatas pada budi daya pertanian lahan kering dan peternakan. Keterbatasan potensi dan karakteristik yang ada pada masyarakat tersebut pada dasarnya masih diperlukan uluran tangan yang dapat dikemas dalam bentuk pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat binaan.¹²

Dalam konteks posisi masyarakat yang demikian ini maka dalam implementasinya perlu mengakomodasinya masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan TNGM tetapi sekaligus diposisikan sebagai bagian dalam konservasi kawasan TNGM. Oleh karena itu arah pengembangan kebijakan pengelolaan TNGM diletakkan dalam konteks kawasan TNGM sebagai pilar konservasi.¹³

Selain itu, guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan Balai TNGM mengacu 8 (delapan) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:¹⁴

1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

¹²Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2004, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024*, hlm 19-20

¹³*Ibid*, hlm 20

¹⁴Renstra Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2010-2014

3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan.
8. Pengetahuan Kelembagaan Kehutanan.

Untuk mengimplementasi kebijakan prioritas pembangunan kehutanan diatas, maka dalam tahun 2010 hingga sekarang Balai TNGM akan melaksanakan Progam konservasi keanekaragaman Hayati dan perlindungan hutan. Progam konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan memiliki tujuan untuk meningkatkan ‘kemandirian’ pengelolaan kawasan konservasi, terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan hak-hak negara atas kawasan dan hasil hutan, serta meningkatnya penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumber daya alam. Beberapa kegiatan dalam progam konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan sangat erat kaitanya dalam merespon terhadap isu-isu perubahan iklim, utamanya dalam hal menekan terjadinya doferestasi dan degradasi hutan.¹⁵

¹⁵Renstra Balai Taman Nasional Gunung Merapi Thun 2010-2014